

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), 82-83.
- Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.
- Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 42.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 15.
- Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 21.
- Bahrudi Supardi, Berbakti Untuk Bumi, (Rosdakarya, Bandung, 2009), h. 11
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 109.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya
- Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), 59.
- Fernando M Manulang, Hukum Dalam Kepastian, (Bandung: Prakarsa, 2007), 95.
- Gatot P.Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), h. 45

- Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2013), h. 124
- Harun M. Husein, *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993), h. 54-55
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 35.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 391.
- Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010, hlm. 14.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 109.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Penerbit Nasional Binacit, Bandung, 1985, hlm. 201
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta, Erlangga, 2004), h. 7
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan unsur-unsur Perikatan.*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 72.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 60.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2
- Raynaldo Sembiring, dkk. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Edisi Pertama)*, (Jakarta : Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2014), h. 225

- Ridhuan Syahrani, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 192.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), 23.
- Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 (2008): hlm. 199
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.
- Selamet Suhartono, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia," Widya Yuridika 1, no. 2 (2018): 129
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 56.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 42.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), 2.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 2007), 160.
- Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 15
- Sukmadinata, Metode Penelitian, (Bandung: Rosdakarya, 2006), 53.

- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, (Jakarta: Edsa Mahkota, 2005), h. 15-16.
- Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta, sinar Grafika, 2010), h. 22
- Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional, (Bandung, PT. Alumni, 2008), h. 65
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014), h. 221
- Taufik Iman Santoso, Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum, (Malang, Setara Press, 2008), h. 34
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 2005), h. 877
- Wahyu Nugroho, Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2022). hlm. 3.
- Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.

Jurnal:

- Aris Yuni Pawestri, ‘Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia’, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), hlm. 103.
- Arvin Asta Nugraha, dkk., Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukumtora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* Vol.7, No.2, Agustus 2021
- Dias Rahmadanti dan Rahayu Subekti, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 Di Kota Surakarta’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.2 (2022), hlm. 447-448.

- Edra Satmaidi, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Konstitusi* Vol. 4 No. 1, Fakultas Universitas Riau, 2011, h. 69
- Fatma Ulfatun Najicha and others, 'Natural Resource Management in the Welfare State Paradigm on the Environmental Policy Rules in Indonesia', *International Journal of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 .
- Fatma Ulfatun Najicha, 'Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 20, Issue 4 2019, 20.4 (2019), 51–55.
- Genoveva Puspitasari , 'Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)', *Jurnal Locus Delicti*, 3.2 (2022), hlm 190.
- Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), hlm. 141
- I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006, h 120.
- Irwansyah, Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 1, January 2017, h. 17
- Julyano, Mario; Yuli Sulistiawan, Aditya, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melaluikonstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, 15.
- Kartono Kartono, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 9, No 3 (2009)

Muh Isra Bil ali, Aminah Aminah Aminah, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia, Jurnal Spektrum Hukum Vol 18, No 2 (2021)

Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Galuh Justisi Vol 3, No 2 (2015),

Olivia Anggie Johar, 'Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', Jurnal Ilmu Lingkungan, 15.1 (2021), hlm. 57 .

Sintiya Karina Wulandari, Muammar Alay Idrus, Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB) JURDICIA Volume 5, Nomor 1, November 2023

Triwanto, SH SPnot. MH, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Wacana Hukum Vol. VIII, No. 1, April 2009

Vica J. E. Saija, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, Jurnal Sasi Vol.20 No. 1 Bulan Januari-Juli 2014

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lainnya:

Mada Apriandi Zuhir, *The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental Law With Reference to The Issue of Global Climate Change*, (Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2012), h. 16

Marfuatul Latifah, 'Citra Penegakan Hukum Di Indonesia Tahun 2023', *INFO Singkat*, 17.23 (2023), hlm. 7.

Melisa Purgianto, *KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENYIMPANGAN TERHADAP KEWAJIBAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN PERIZINAN BERUSAHA*, *Lex Privatum* Vol.XII/No.1/jul/2023

Muladi, *Beberapa Catatan Dalam RUU KUHP*, dalam *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2006, h. 15

